



Jangan Hanya Kerjakan Rutinitas

SAMBAS - Bupati Sambas, H Atbah Romin Suhaili LC MH menegaskan dalam penempatan seseorang dalam jabatan tertentu, bukan dilakukan secara sembarangan. Sejumlah aturan dan tahapan sudah dilalui sebelumnya. "Saya sebagai Bupati Sambas, selalu memberikan arahan, dalam penempatan jabatan itu tak sembarangan, semua harus sesuai dengan aturan. Arahan saya jelas, menempatkan orang di jabatan yang tepat, sesuaikan latar belakang pendidikan, pengalaman, arahan saya semacam

itu," katanya.

Lantaran, hal tersebut untuk mencapai harapan untuk memperbaiki kinerja. Sehingga tugas pokok sebagai abdi negara, bukanlah sekadar rutinitas, tapi harus memiliki inovasi dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

"Arahan saya seperti itu, ini menjadi penting karena pejabat harus memiliki inovasi karena dengan inovasi itu kita bisa bergerak, kalau tak berinovasi dan melakukan rutinitas saja, maka tak bergerak," katanya.

Selain sesuai aturan, Atbah

jugamenyebutkan dalam pelaksanaan mutasi atau pergeseran ASN. Harus berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), kemudian ada peran Baperjakat. Kemudian jangan sampai karena alasan suka atau tidak suka (like and Dislike), alasan politis.

"Ndak boleh itu (like and dislike), jangan biasakan itu. Kita jangan membiasakan seperti itu, harus profesional dan proporsional, agar tak menjadi pelajaran tak baik. Penempatan seseorang dalam jabatan tertentu tujuannya

ingin kinerja pemerintah lebih baik, terlebih di Pemkab Sambas sedang mengejar penilaian kepatuhan dari ombudsman, mempertahankan opini WTP dari BPK RI, mengejar reformasi birokrasi, jadi perlu orang yang cepat dan rajin bekerja," katanya.

Dengan harapan, akan nampak adanya perubahan yang dilakukan di OPD masing-masing. "Kami ingin ada perubahan nampak, kalau tak berubah itu berarti hanya melakukan rutinitas," katanya. Atbah juga mengingatkan,

dalam melaksanakan kinerja. Selalu ada penilaian, dan reportnya biasanya ada di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Daerah Kabupaten Sambas.

"Setiap OPD (Kepala OPD), akan dilakukan evaluasi terhadap kinerja masing-masing oleh Timsel yang berisi orang-orang profesional, ada dari BKN, akademisi, birokrat yang tugasnya melakukan evaluasi kinerja, selama dua tahun menjabat dievaluasi," katanya. (fah)